

ABSTRAK
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 1 TAHUN 2014

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013	
ABSTRAK :	<p>a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-undang no.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang no.8 tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no.3 tahun 2005 tentang perubahan undang-undang no.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjadi undang-undang, kepala daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;</p> <p>bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana di maksud di atas perlu di tetapkan dengan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2013.</p>
	<p>b. Dasar Hukum :</p> <p>UU No. 29 Th 1959; UU No.28 Th 1999; UU No. 17 Th 2003; UU No. 1 Th 2004; UU No 12 Th 2011; UU No 15 Th 2004; UU No 25 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No. 20 Th 2001; PP No. 65 Th 2001; PP No. 66 Th 2001; PP No. 24 Th 2004; PP No. 23 Th 2005; PP No. 55 Th 2005; PP No. 56 Th 2005; PP No. 58 Th 2005; PP No. 65 Th 2005; PP No. 8 Th 2006; PP No. 71 Th 2010; PP No. 30 Th 2011; PP No. 2 Th 2012; Permendagri No. 13 Th 2006; Permendagri No. 55 Th 2008; Perda No. 4 Th 2009; Perda No. 7 Th 2012; Perwali No. 51 Th 2012; Perda No.87 Th 2013.</p>
	<p>c. I. Pasal 1</p> <p>(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan</p> <p>(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di lampiri dengan laporan kinerja dan ihtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Pemerintah Daerah.</p> <p>II. Pasal 2 Laporan Realisasi Anggaran</p> <p>III. Pasal 3 Uraian Laporan Realisasi Anggaran</p> <p>IV. Pasal 4 Neraca</p> <p>V. Pasal 5 Laporan Arus Kas</p> <p>VI. Pasal 6 Catatan atas laporan keuangan</p> <p>VII. Pasal 7 Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD</p> <p>VIII. Pasal 8 Lampiran Laporan Keuangan</p> <p>IX. Pasal 9 Walikota Makassar menetapkan Perwali</p> <p>X. Pasal 10 Perda mulai berlaku pada tanggal di undangkan</p>

Catatan	d. - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 Agustus 2014 - Ditetapkan 13 Agustus 2014
---------	---